

FAKTOR PENENTU BELANJA MODAL DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI NUSA TENGGARA BARAT

EKA SINTALA DEWI ANJANI¹ AKRAM² LILIK HANDAJANI²

¹ Dinas Kehutanan NTB

² Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi

ABSTRACT

This research has goal to verify and to find empirical proof on the effect of Local Own Revenue, the Intergovernmental Revenue and Size of Local Government on capital expenditure and the influence of capital expenditure on financial performance in local government of West Nusa Tenggara using Partial Least Square (PLS) analysis. The verification had done in all government levels in West Nusa Tenggara consists of 10 districts level and one provence level used secondary data such as financial report of West Nusa Tenggara government during period 2009 to 2013. The result shows the influence of Local Own Revenue on capital expenditure significantly positive (which Local Own Revenue is the main factor of the capital expenditure determinant). While the capital expenditure had positive influenced on financial performance of West Nusa Tenggara government significantly. These indicated that higher Local Own Revenue will be followed by higher capital expenditure as well as higher financial performance of local government. Nevertheless, Intergovernmental Revenue and the proxy of Size of Local Government on total asset had not influenced on capital expenditure (Intergovernmental Revenue and Size are not the main factor determinant). These indicated that local government had not utilize the Intergovernmental Revenue optimal yet to realize number of capital expenditure. As well as the local government had not consider the total asset in the end of fiscal year yet as the judgement to realize capital expenditure in the next fiscal year. The implication of this research can use as the base of making decision on Local Own Revenue and Intergovernmental Revenue management for capital expenditure on direct public service, as well as base judgement on financial performance rating of executive (agent) by legislative and public (principal).

Keywords : Capital Expenditure, Financial Performance of Local Government, Intergovernmental Revenue, Local Own Revenue.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh PAD, dana perimbangan dan ukuran (*size*) Pemerintah Daerah terhadap belanja modal serta pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah di NTB, dengan menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS). Pengujian dilakukan pada seluruh Pemerintah Daerah di NTB yang terdiri dari 1 Pemerintah Provinsi dan 10 Pemerintah Kabupaten/kota se-NTB dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di NTB tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal (PAD merupakan faktor penentu belanja modal) dan belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di NTB. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD maka belanja modal akan semakin tinggi dan semakin tinggi belanja modal akan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Sementara itu, dana perimbangan dan ukuran (*size*) Pemerintah Daerah yang diprosikan dengan total aset tidak mempengaruhi belanja modal (DP dan *size* bukan faktor penentu belanja modal). Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah belum menggunakan dana perimbangan secara optimal untuk merealisasikan sejumlah belanja modal dan pemerintah belum melihat total aset/kekayaan di akhir tahun sebagai pertimbangan untuk merealisasikan belanja modal di tahun berikutnya. Implikasi penelitian ini, dapat digunakan sebagai

dasar dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan pendapatan daerah (terutama pengelolaan PAD dan Dana perimbangan) untuk belanja modal yang dapat menyentuh langsung kepada pelayanan publik, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja keuangan eksekutif (agen) oleh legislatif dan publik (*principal*).

Keywords : Belanja modal, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

1. Pendahuluan

Salah satu tantangan bagi Pemerintah Daerah (PEMDA) di era otonomi saat ini adalah meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber dan potensi-potensi kekayaan asli daerah yang dimiliki serta dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Tersedianya sarana dan prasarana serta infrastruktur daerah yang memadai, merupakan salah satu bentuk nyata pelayanan Pemda kepada masyarakat/publik. Sholikhah dan Wahyudin (2014) mengargumentasikan bahwa belanja modal menjadi pendukung dari peningkatan sarana dan prasarana bagi pelayanan publik. Sejalan dengan temuan sebelumnya, belanja modal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat (Paujiah, 2010).

Pemda dapat menggunakan pendapatan yang dimiliki baik itu yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk merealisasikan sejumlah belanja daerah dalam bentuk belanja modal. Harianto dan Adi (2007) mengungkapkan upaya untuk meningkatkan otonomi daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal untuk pengembangan sektor-sektor produktif di daerah.

Data Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan bahwa, Pemerintah Pusat memberikan target rata-rata realisasi belanja modal Pemda pada kisaran 22%-29% dari total belanja daerah sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 (Sugiono, 2014). Pemda di NTB selama tahun 2009 sampai 2013 hanya mampu memenuhi rata-rata proporsi belanja modal sebesar 18,90% dibandingkan dengan total belanja daerah pada tahun yang sama. Artinya bahwa realisasi belanja modal Pemda di NTB belum memenuhi target rata-rata nasional. Diharapkan kedepannya, Pemda di NTB dapat memanfaatkan pendapatan daerah yang diperoleh untuk merealisasikan sejumlah belanja modal yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat.

Dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH merupakan dana transfer Pemerintah Pusat untuk menutupi kebutuhan *fiscal* daerah yang sepenuhnya belum mampu dibiayai oleh pendapatan asli daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat menjadi sumber pendanaan utama untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah (Adam *et al.*, 2013). Bahkan DAU jumlahnya paling signifikan untuk hampir seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia (Brodjonegoro, 2001).

Fenomena yang sama terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2009 sampai dengan 2013, Pemerintah Daerah di NTB menempatkan DAU sebagai penyumbang pendapatan daerah terbesar dengan prosentase mencapai 59%, kemudian PAD sebesar 13%, lain-lain pendapatan daerah yang sah 10%, DBH 8% dan DAK 7%.

PAD yang dikumpulkan Pemda dapat mempengaruhi realisasi belanja modal (Tuasikal, 2008; Subowo dan Wati, 2010; Kurniawan, 2013; Sholikhah dan Wahyudin, 2014; Mayasari *et al.*, 2014). Sementara studi Oktora dan Pontoh (2013) menemukan korelasi yang rendah antara PAD dan belanja modal akibat kurangnya proporsi PAD dalam penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, studi Abdulah dan Halim (2006), Paujiah (2010), dan Wandira (2013) menemukan PAD tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal Pemerintah Daerah.

Pendapatan yang diperoleh Pemda yang berasal dari dana perimbangan dapat mempengaruhi belanja modal (Abdullah dan Halim, 2006; Subowo dan Wati, 2010). Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan pada pendapatan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dapat mempengaruhi jumlah belanja modal yang direalisasikan Pemda. Studi Oktora dan Pontoh (2013) melihat ada hubungan yang erat antara DAU yang merupakan salah satu komponen dana perimbangan dengan belanja modal. Namun studi Sholikhah dan Wahyudin (2014) menemukan DAU tidak mempengaruhi belanja modal. Dana perimbangan yang lain yaitu DAK memiliki hubungan yang sangat erat dengan belanja modal Pemda (Oktora dan Pontoh, 2013). DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Kurniawan, 2013), namun studi Darmayasa dan Suandi (2014) menemukan DAK tidak mempengaruhi belanja modal. DBH juga berpengaruh terhadap realisasi belanja modal (Wandira, 2013), meskipun studi Kurniawan (2013) tidak menemukan pengaruh DBH terhadap belanja modal Pemda.

Selain faktor pendapatan, ukuran Pemerintah Daerah juga dapat mempengaruhi belanja modal. Semakin besar ukuran suatu Pemda kebutuhan akan infrastruktur pun semakin banyak, dengan demikian realisasi belanja modal diharapkan semakin tinggi dari tahun ke tahun. Manik dan Suprihartini (2013) melihat ukuran Pemda dengan proksi total aset berpengaruh terhadap penggunaan belanja modal. Jumlah aset atau kekayaan daerah merupakan jumlah kekayaan/ aset yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam menjalankan roda pemerintahan dan aktivitas publik/masyarakat. Total aset/kekayaan Pemda di NTB cenderung meningkat setiap tahunnya.

Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari kualitas dan kuantitas infrastruktur dan sarana prasarana yang dibangun oleh Pemda. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Darsono (2013), Sugiono (2014), Imawan dan Wahyudin (2014) serta Darwis (2015) melihat ada pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemda. Namun penelitian Simanullang (2013) dan Nugroho (2012) menemukan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda. Kinerja keuangan Pemda di NTB, dilihat dari rasio kemandirian, rata-rata masih belum mandiri atau ada pada kategori kemampuan keuangan rendah sekali. Dilihat dari rasio efisiensi, rata-rata masuk dalam kategori kurang efisien, sementara itu dilihat dari rasio efektifitas, rata-rata masuk dalam kategori sangat efektif.

Penelitian ini dimotivasi dengan adanya fenomena-fenomena realisasi belanja modal di NTB selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 yang masih di bawah target rata-rata nasional. Hal ini diindikasikan karena kinerja keuangan pemerintah daerah di NTB yang masih belum mandiri dan kurang efisien serta trend pendapatan daerah yang bersumber dari PAD yang cenderung fluktuatif dan dana perimbangan yang cenderung meningkat setiap tahun. Adanya perbedaan hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal dan pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan di beberapa daerah di Indonesia menjadi peluang penelitian yang menarik dalam area riset mengenai faktor penentu belanja modal dan konsekuensinya terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat.

2. Rerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber asli daerah dan dapat digunakan untuk belanja daerah terutama diharapkan dapat dioptimalkan untuk belanja modal. Masalah keagenan (*agency problems*) senantiasa terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses penentuan target pendapatan dan pengalokasian sumber daya dalam belanja daerah. Masyarakat sebagai *principal* memberikan wewenang pengaturan dan memberikan sumber daya (dalam bentuk pajak, retribusi dan lain-lain) kepada Pemerintah sebagai agen untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah Daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

Pemenuhan infrastruktur, sarana dan prasarana publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, dengan adanya pelayanan publik yang berkualitas diharapkan akan berdampak pada peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat yang tercermin dari kemampuan masyarakat membayar sejumlah pungutan yang telah ditetapkan daerah. Seperti yang diungkapkan Mayasari *et al.* (2014), peningkatan daerah dalam belanja modal diharapkan mampu dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari peningkatan PAD.

Studi Subowo dan Wati (2010), melihat ada hubungan antara PAD dan belanja modal. Tuasikal (2008), Kurniawan (2013), Mayasari *et al.* (2014), serta Solikhah dan Wahyudin (2014), melihat bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin tinggi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut dan sebaliknya. Korelasi yang lemah antara PAD dan Belanja modal akibat kurangnya proporsi PAD dalam penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah ditemukan Oktora dan Pontoh (2013). Sejalan dengan hal tersebut, studi Abdulah dan Halim (2006), Paujiah (2010), dan Wandira (2013) tidak menemukan pengaruh PAD terhadap realisasi belanja modal Pemda, karena lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diasumsikan bahwa PAD harus terus dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada publik melalui realisasi belanja modal yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan pelayanan publik melalui belanja modal dapat tercermin dari sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai untuk menunjang roda perekonomian masyarakat. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

2.2. Dana Perimbangan dan Belanja Modal

Pelaksanaan hubungan keagenan antara masyarakat (*principal*) dengan Pemerintah Daerah (agen) dalam bentuk peningkatan pelayanan publik melalui pengalokasian belanja modal di beberapa daerah tidak bisa hanya mengandalkan PAD saja. Oleh karena jumlah PAD yang masih minim, maka daerah memerlukan tambahan dana berupa dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Bagi daerah-daerah yang kebutuhan finansialnya lebih besar dari pada potensi penerimaan daerahnya, Pemerintah Pusat mentrasfer sejumlah dana dengan perhitungan tertentu. Sejumlah studi menemukan secara keseluruhan adanya hubungan yang signifikan antara dana perimbangan dan belanja modal (Abdullah dan halim, 2006; Subowo dan Wati, 2010).

Studi Oktora dan Pontoh (2013) melihat ada hubungan yang erat antara DAU yang merupakan salah satu komponen dana perimbangan dengan belanja modal. Namun studi Sholikhah dan Wahyudin (2014) tidak menemukan pengaruh DAU terhadap belanja modal. Dana perimbangan yang lain yaitu DAK memiliki hubungan yang sangat erat dengan belanja modal Pemda (Oktora dan Pontoh, 2013). Bahkan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Kurniawan, 2013), namun studi Darmayasa dan Suandi (2014) menemukan DAK tidak mempengaruhi belanja modal. DBH juga berpengaruh terhadap realisasi belanja modal (Wandira (2013), namun studi Kurniawan (2013) menemukan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah selaku agen yang diberikan wewenang untuk mengelola dana publik, akan berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (*principal*) dengan terus melakukan pembangunan terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan langsung oleh publik dalam menjalankan aktifitas ekonominya. Pendapatan daerah selain PAD yaitu

dana perimbangan merupakan pendapatan potensial yang dapat digunakan untuk menambah realisasi belanja modal setiap tahunnya. Dengan demikian hipotesis ke dua dari penelitian ini adalah :

H₂ : Dana Perimbangan Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

2.3. Ukuran (size) Pemerintah Daerah dan Belanja Modal

Pemerintah daerah selaku agen bagi masyarakat (*principal*) akan terus mengalokasikan pendapatan yang dimiliki untuk belanja modal yang tercermin dari semakin pesatnya sarana dan prasarana serta infrastruktur daerah. Ukuran Pemerintah Daerah yang diproksikan melalui total aktiva/aset memiliki pengaruh terhadap belanja modal (Manik dan Suprihartini, 2013). Dengan demikian semakin tinggi total aktiva/aset pemerintah daerah maka realiasi belanja modal juga semakin meningkat.

Total aset/kekayaan mencerminkan kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah pada akhir tahun yang salah satunya berupa aset tetap, jika nilai ekonomis aset/aktiva sudah habis maka akan mempengaruhi belanja modal, artinya belanja modal harus bertambah untuk pembelian aset. Selain itu jumlah Aset/aktiva yang dimiliki daerah menunjukkan jumlah harta yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pembelian atau pengadaan aset/aktiva melalui anggaran belanja modal tentu karena ada kebutuhan sehingga menjadi ukuran untuk daerah dalam memenuhi layanan publik. Dengan demikian diajukan hipotesis ke tiga sebagai berikut :

H₃ : Ukuran (*size*) Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

2.4. Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah

Masyarakat yang diwakilkan oleh legislatif selaku *principal* bagi Pemerintah Daerah (agen), harus terus melakukan kontrol terhadap pemerintah dalam proses pelaksanaan anggaran. Menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu kontrol yang dapat dilakukan legislatif. Pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif dan ekonomis merupakan cerminan dari kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Belanja modal yang besar merupakan gambaran dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun oleh Pemerintah Daerah. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Sugiono (2014) melihat ada pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Begitu pula Darsono (2013) melihat ada pengaruh positif belanja

modal terhadap kinerja keuangan daerah walaupun tidak signifikan. Imawan dan Wahyudin (2014) serta Darwis (2015) menemukan belanja modal berpengaruh dengan arah negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian Nugroho dan Simanullang (2013) menemukan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Walaupun demikian, belanja modal yang direalisasikan pemerintah dalam sarana dan prasarana fisik, merupakan wujud dari peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan demikian hipotesis keempat penelitian ini adalah :

H₄ : Belanja Modal Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Metoda Penelitian

3.1. Populasi dan Data Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah di NTB yang terdiri dari 1 Pemerintah Provinsi dan 10 Pemerintah Kabupaten dan Kota. Penelitian ini mengambil seluruh populasi sebagai subjek penelitian sehingga penelitian ini merupakan penelitian sensus. Data penelitian ini merupakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2013. Data diperoleh dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id.

3.2. Variabel dan Pengukuran

3.2.1. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan Pemda merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Agustina, 2013). Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diukur dengan :

a) Rasio kemandirian, dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

b) Rasio efisiensi, dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

c) Rasio efektifitas, dihitung dengan rumus :

$$\frac{REALISASI PAD}{TARGET PENERIMAAN PAD} \times 100\%$$

3.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal menurut Halim (2002:73), merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 (satu) tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan daerah. Belanja modal diukur menggunakan angka realisasi belanja tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; serta belanja aset tetap lainnya yang ada pada laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013.

3.2.3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (UU 33 tahun 2004). PAD diukur dengan angka realisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah pada laporan realisasi anggaran tahun 2009 sampai dengan 2013.

3.2.4. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU 33 Tahun 2004). Dana perimbangan terdiri dari DAU, DAK, dan DBH. Dalam penelitian ini dana perimbangan diukur dengan menggunakan angka realisasi DAU, DAK dan DBH pada laporan realisasi anggaran tahun 2009 sampai dengan 2013.

3.2.5. Ukuran (*size*) Pemerintah Daerah

Ukuran (*size*) Pemerintah Daerah merupakan salah satu karakteristik Pemerintah Daerah. Ukuran Pemerintah Daerah menunjukkan seberapa besar organisasi pemerintahan daerah tersebut, (Suharjanto, 2010). Ukuran Pemerintah Daerah dalam penelitian ini diukur dengan total aset pada Neraca Pemerintah Daerah tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012.

3.3. Analisis dan Data

Penelitian ini melibatkan 3 variabel eksogen (PAD, dana perimbangan dan ukuran (*size*) Pemerintah Daerah) dan 2 variabel endogen (belanja modal dan kinerja keuangan daerah). Model pengukuran diuji dengan persamaan sebagai berikut :

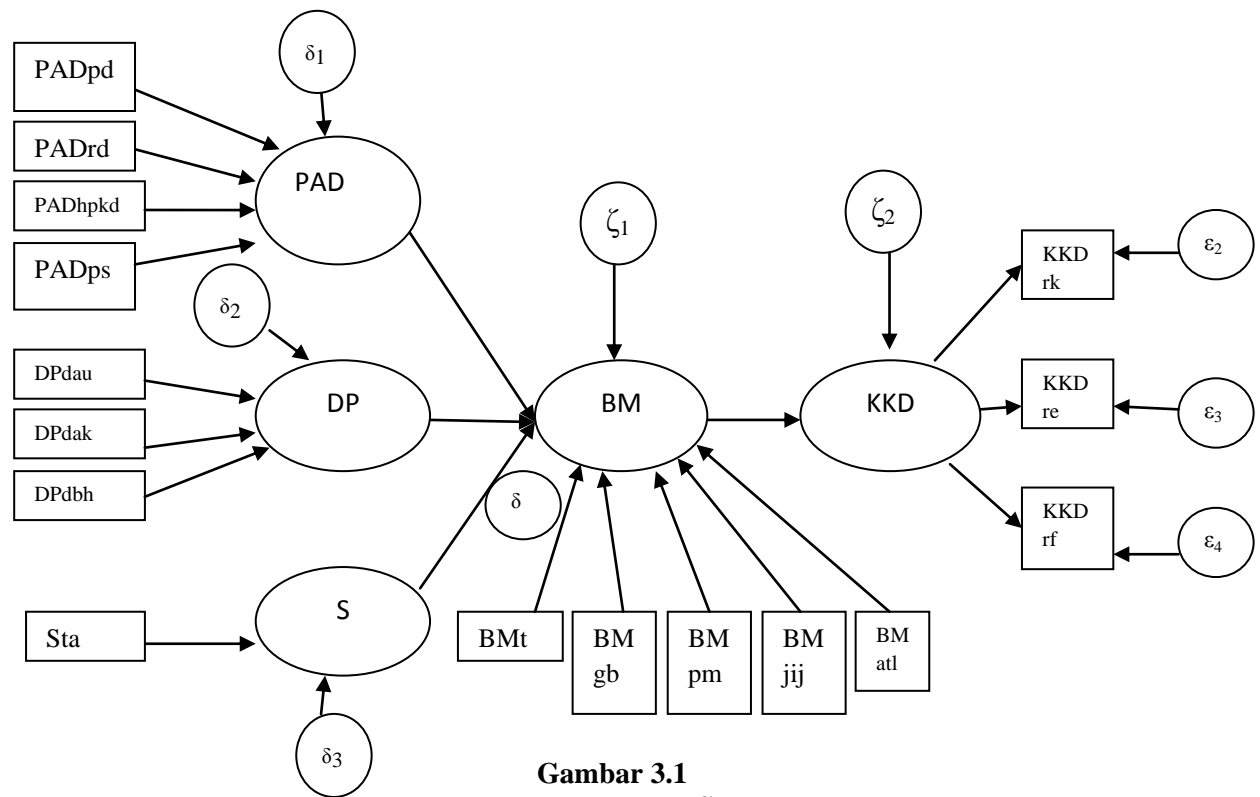
$$\begin{aligned}
 PAD &= \lambda_1 PADpd + \lambda_2 PADrd + \lambda_3 PADhpkd + \lambda_4 PADps + \delta_1 \\
 DP &= \lambda_1 DPdau + \lambda_2 DPdak + \lambda_3 DPdbh + \delta_2 \\
 S &= \lambda_1 Sta + \varepsilon_1 \\
 BM &= \lambda_1 BMt + \lambda_2 BMpm + \lambda_3 BMgb + \lambda_4 BMjjj + \lambda_5 BMatl + \delta_3 \\
 KKDrk &= \lambda_1 KKDrk KKD + \varepsilon_2 \\
 KK Dre &= \lambda_2 KK Dre KKD + \varepsilon_3 \\
 KK Drf &= \lambda_3 KK Drf KKD + \varepsilon_4
 \end{aligned}$$

Model persamaan struktural diuji dengan persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 BM &= \gamma_1 PAD + \gamma_2 DP + \gamma_3 S + \zeta_1 \dots\dots\dots 1 \\
 KKD &= \beta_1 BM + \zeta_2 \dots\dots\dots 2
 \end{aligned}$$

Keterangan :

- β = Beta, koefisien pengaruh variabel *endogen* terhadap variabel *endogen*
- γ = Gamma, koefisien pengaruh variabel *eksogen* terhadap variabel *endogen*
- ζ = Zeta, galat model
- δ = Delta, galat pengukuran indikator formatif
- ε = Epsilon, galat pengukuran indikator reflekti



Gambar 3.1
Model Pengukuran dan Struktural

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah dibentuk dengan indikator :

PADhpkd = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

PADps =Lain-lain PAD yang sah, PADrs= Retribusi Daerah dan PADpd = Pajak Daerah

DP = Dana Perimbangan dibentuk dengan indikator :

DPdbh= Dana Bagi Hasil, DPdak = Dana Alokasi Khusus dan

DPdau= Dana Alokasi Umum

S = Size dibentuk dengan indikator Sta = Total Aktiva

BM = Belanja Modal dibentuk dengan indikator

BMt = Tanah, BMpm = Peralatan dan Mesin, BMjij = Jaringan, Irigasi dan Jalan,

BMgb = Gedung dan Bangunan dan BMatl = Aset Tetap Lainnya.

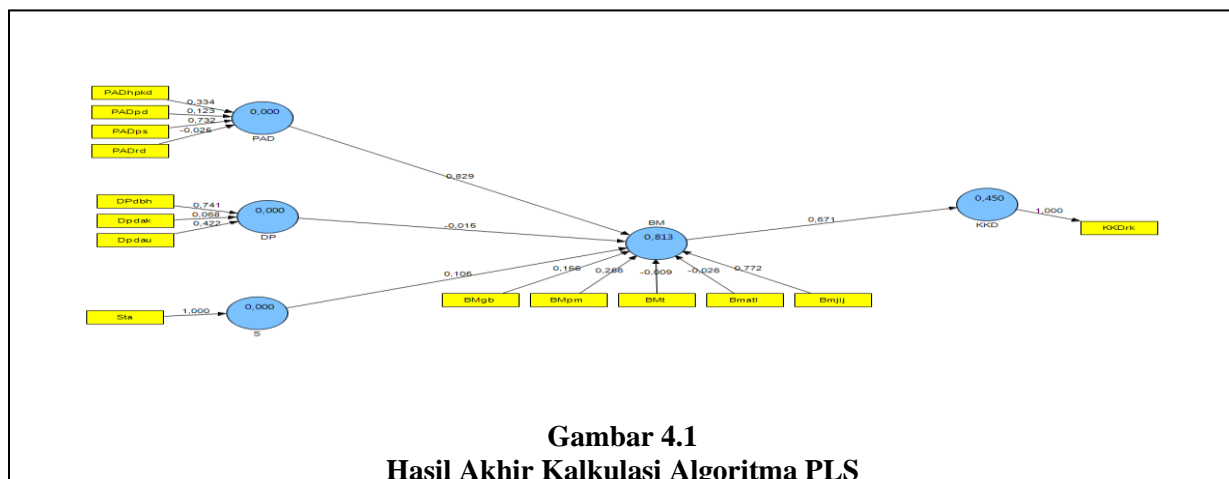
KKD = Kinerja Keuangan Daerah direfleksikan dengan indikator :

KKDrk= Rasio Kemandirian, KKdre = Rasio Efisiensi dan KKDrf= Rasio Efektifitas

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Pengujian Model Pengukuran, Model Struktural, *Goodness of Fit*

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi uji linieritas dengan aplikasi SPSS 21 dengan model *curve estimation*. Indikator yang merefleksikan konstruk berdasarkan hasil kalkulasi awal algoritma PLS menunjukkan indikator rasio efisiensi dan indikator rasio efektifitas harus di drop dari model karena nilai loading faktornya $< 0,5$. Selanjutnya di lakukan proses *calculate algorithm* kembali dan diperoleh hasil kalkulasi akhir algoritma seperti gambar di bawah ini:



Gambar 4.1
Hasil Akhir Kalkulasi Algoritma PLS

Sumber : Smartpls (diolah)

Berdasarkan gambar 4.1, dapat dilihat *loading faktor* untuk indikator KKDrk yaitu 1, sehingga dapat dinyatakan konstruk KKD sudah memenuhi uji *Convergent Validity* karena loading faktornya $>0,5$. Selain uji *Convergent Validity*, konstruk dengan indikator reflektif juga dapat diuji *Discriminant Validity* dengan melihat *cross loading*, dan nilai *cross loading* konstruk KKD yaitu $1 >$

0,7 sehingga konstruk KKD dinyatakan valid. Konstruk KKD memiliki *Composite Reliability* > 0,7, artinya konstruk KKD dapat dinyatakan reliabel.

Berdasarkan perhitungan R square hasil kalkulasi algoritma PLS diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.1

R Square

Konstruk	R Square
BM	0.8125
DP	
KKD	0.4502
PAD	
S	

Sumber : Lampiran

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui konstruk variabel belanja modal (BM) dapat di terangkan oleh konstruk variabel PAD, DP dan S sebesar 81,25% sementara 18,75% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selain itu variabel PAD, DP dan S masuk dalam kategori kuat untuk menerangkan variabel belanja modal karena nilai *r square* > 0,64. Konstruk variabel kinerja keuangan daerah (KKD) dapat diterangkan oleh konstruk variabel belanja modal (BM) sebesar 45,02% atau masuk dalam kategori moderat karena nilai *r square* 0,4502 <0,64 dan > 0,33. Sementara itu 54,98 % variabel kinerja keuangan daerah diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Perhitungan *Goodness of Fit model* penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Goodness of Fit

	R-Square	Communality	GOF
KKD	0,4502	1	
BM	0,8125	0,3485	
PAD		0,54	0,66
DP		0,4944	
S		1	
Rerata	0,63135	0,67658	

Sumber : Lampiran

Tabel 4.2 menunjukkan index GOF 0,66 yang artinya variansi yang dijelaskan oleh konstruk-konstruk dalam model lebih besar dari faktor residual diluar model. Berdasarkan kriteria index GOF maka model dalam penelitian ini masuk dalam kategori kuat, karena index GOF > 0,36. Ringkasan hasil pengujian model struktural untuk masing-masing hipotesis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample Mean (O)	Sample Mean (M)	T Statistics (O/STERR)	Hipotesis	Keterangan
PAD -> BM	0,8294	0,8415	6,9637	H ₁	Diterima
DP -> BM	-0,0145	0,009	0,0691	H ₂	Ditolak
S -> BM	0,1049	0,0821	0,6839	H ₃	Ditolak
BM -> KKD	0,671	0,6836	4,4849	H ₄	Diterima

Sumber : *output bootstrapping smartpls (2015)*

Berdasarkan tabel 4.3 diatas terdapat dua hipotesis alternatif diterima yaitu H₁ dan H₄. Dua hipotesis alternatif di tolak yaitu H₂ dan H₃, pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (*one tailed*).

4.2. Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

4.2.1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal Pemerintah Daerah di NTB. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah di NTB menggunakan PAD untuk meningkatkan realisasi belanja modalnya (PAD merupakan faktor penentu belanja modal). Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Subowo dan Wati (2010), yang melihat ada hubungan antara PAD dan belanja modal. Sejalan juga dengan penelitian Tuasikal (2008), Mayasari *et al.* (2014), serta Solikhah dan Wahyudin (2014), yang melihat bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin tinggi belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut dan sebaliknya. Sementara itu, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan studi Oktora dan Pontoh (2013) yang melihat adanya korelasi rendah antara PAD dan belanja modal, tidak sejalan juga dengan studi Abdulah dan Halim (2006), Paujiah (2010), dan Wandira (2013), yang menemukan PAD tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal Pemerintah Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain.

PAD yang berpengaruh signifikan positif terhadap realisasi belanja modal pada Pemerintah Daerah di NTB, mengindikasikan bahwa PAD digunakan Pemerintah Daerah di NTB untuk meningkatkan realisasi belanja modal. Meskipun kontribusi PAD hanya 13% pada total pendapatan daerah di NTB, namun PAD merupakan hasil dari sumber-sumber kekayaan asli daerah NTB yang pengelolaan dan penggunaannya merupakan kewenangan penuh Pemerintah Daerah tanpa adanya

campur tangan Pemerintah Pusat. Kedepan Pemerintah Daerah di NTB harus terus meningkatkan realisasi penerimaan PAD sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan realisasi belanja modal setiap tahunnya.

4.2.2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis ke-2 menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak signifikan mempengaruhi realisasi belanja modal pada Pemerintah Daerah di NTB (DP bukan faktor penentu belanja modal). Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun kontribusi dana perimbangan mencapai 73% pada total pendapatan daerah di tahun 2009 sampai dengan 2013, belum mampu dimanfaatkan Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan belanja modal. Hal ini terjadi karena campur tangan Pemerintah Pusat pada dana perimbangan sangatlah besar yang ditandai dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah untuk mengelola dan merealisasikan dana perimbangan. Artinya Pemerintah Daerah di NTB belum memiliki keleluasaan mengelola dana perimbangan seperti keleluasaan wewenang dalam mengelola PAD yang bersumber dari pendapatan sendiri. DAU misalnya, merupakan dana perimbangan yang paling besar kontribusinya pada pendapatan daerah di NTB yaitu mencapai 59%, hampir sebagian besar digunakan untuk membayar gaji pegawai dan belanja rutin lainnya. Hal ini karena DAU bersifat "*block grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, dimana saat ini prioritas dan kebutuhan utama Pemerintah Daerah di NTB adalah belanja pegawai.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Abdullah dan Halim (2006), serta Subowo dan Wati (2010) yang menemukan bahwa secara keseluruhan ada hubungan yang signifikan antara dana perimbangan dan belanja modal. Menurut Abdullah dan Halim (2006), Pemerintah Daerah lebih cenderung menggunakan pendapatan yang diperoleh dari pihak lain yaitu Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan untuk belanja modal dari pada menggunakan pendapatan yang diperoleh dari usaha sendiri yaitu PAD.

DAU yang merupakan salah satu dana perimbangan yang berkontribusi paling besar pada pendapatan daerah di NTB selama tahun 2009 sampai dengan 2013 yaitu mencapai 59%, diharapkan kedepannya dapat dioptimalkan penggunaannya untuk belanja modal yang menyentuh langsung kepada pelayanan publik, dengan cara mengurangi belanja pegawai dan belanja rutin lainnya. Studi Oktora dan

Pontoh (2013) melihat ada hubungan yang erat antara DAU yang merupakan salah satu komponen dana perimbangan dengan belanja modal. Namun studi Sholikhah dan Wahyudin (2014) menemukan DAU tidak mempengaruhi belanja modal, namun dengan penganggaran yang terencana dan terarah, kedepannya diharapkan DAU dapat dioptimalkan penggunaannya untuk belanja modal pada Pemerintah Daerah di NTB.

Dana perimbangan berupa DBH berkontribusi 8% pada pendapatan daerah di NTB selama tahun 2009 sampai dengan 2013. Kedepannya di harapkan dana ini dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan belanja modal. Penelitian Wandira (2013) menemukan DBH berpengaruh terhadap realisasi belanja modal, namun studi Kurniawan (2013) menemukan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah di NTB harus lebih kreatif dalam merancang program-program yang sejalan dengan program Pemerintah Pusat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat.

DAK merupakan “*special grant*”, diberikan kepada daerah-daerah tertentu termasuk NTB untuk membantu pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur daerah. Kontribusi DAK pada pendapatan daerah di NTB hanya 7%. DAK memiliki hubungan yang sangat erat dengan belanja modal Pemerintah Daerah (Oktora dan Pontoh, 2013) dan studi Kurniawan (2013) menemukan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun studi Darmayasa dan Suandi (2014) menemukan DAK tidak mempengaruhi belanja modal. Apabila Pemerintah Daerah di NTB lebih kreatif merancang program-program yang selaras dengan program Pemerintah Pusat dalam hal pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur di NTB, maka diharapkan kedepannya DAK dapat terus meningkat jumlahnya dan dapat meningkatkan pula belanja modal di NTB.

4.2.3. Pengaruh ukuran (size) Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal

Hipotesis ke-3 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran (*size*) Pemerintah Daerah yang di ukur dengan total aktiva tahun t-1 dari realisasi belanja modal tidak signifikan mempengaruhi realiasi belanja modal pada Pemerintah Daerah di NTB (ukuran (*size*) Pemerintah Daerah bukan penentu belanja modal). Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah di NTB belum menjadikan total aktiva sebagai pertimbangan untuk merealisasikan sejumlah pendapatannya untuk belanja modal.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Manik dan Suprihartini (2013) yang menemukan bahwa ukuran (*size*) Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan total aktiva berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Daerah. Diharapkan kedepannya, Pemerintah Daerah di NTB dapat menjadikan total aktiva di akhir tahun anggaran, sebagai pertimbangan awal untuk menentukan anggaran belanja modal di tahun berikutnya.

4.2.4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis ke-4 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja modal Pemerintah Daerah di NTB dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Belanja modal memiliki konsekuensi terhadap KKD). KKD pemerintah daerah yang diukur dengan Rasio Kemandirian dapat memberikan bukti bahwa, belanja modal yang besar terutama bila difokuskan pada sarana dan prasarana yang dapat menyentuh langsung pada publik seperti jalan, irigasi dan jaringan, serta peralatan dan mesin dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah di NTB. Hal ini disebabkan karena, semakin tingginya realisasi belanja modal yang dapat menyentuh langsung masyarakat maka masyarakat dapat menjalankan segala aktifitas dan roda perekonomiannya, serta dapat meningkatkan kemampuan sosial dan ekonominya untuk membayar sejumlah pungutan yang sah, yang dapat menambah pendapatan asli pemerintah daerah, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kemandirian Pemerintah Daerah di NTB.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sugiono (2014) yang menemukan ada pengaruh positif signifikan belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah yang dananya dapat berasal dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan kontribusi pendapatan asli daerah lebih besar dari pada kontribusi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang dialokasikan untuk belanja daerah yang salah satunya untuk belanja modal.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Darsono (2013) yang menemukan ada pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah dengan rasio kemandirian namun tidak signifikan. Bertentangan juga dengan penelitian Imawan dan Wahyudin (2014) serta Darwis (2015) yang menemukan belanja modal berpengaruh dengan arah negatif terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mengoptimalkan belanja modal untuk meningkatkan kemandirian daerah serta proporsi belanja modal yang menyentuh langsung kepada publik belum mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah.

5. Simpulan, Implikasi dan Keterbatasan

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh PAD, dana perimbangan dan ukuran (*size*) Pemerintah Daerah terhadap belanja modal serta pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di NTB. Model penelitian ini merupakan model struktural dengan alat analisa *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal, sehingga PAD merupakan faktor penentu belanja modal Pemerintah Daerah di NTB. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD yang diterima Pemerintah Daerah maka belanja modalnya juga semakin tinggi. Kedepannya diharapkan Pemerintah Daerah di NTB dapat meningkatkan PAD dan menggunakannya lebih banyak untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah di NTB dapat mencapai target nasional dalam realisasi belanja modal

Dana perimbangan tidak mempengaruhi belanja modal sehingga dana perimbangan bukan merupakan faktor penentu belanja modal Pemerintah Daerah di NTB. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah di NTB lebih banyak menggunakan dana perimbangan untuk belanja selain belanja modal, seperti belanja pegawai dan belanja rutin lainnya. Tidak hanya itu, Pemerintah Daerah di NTB juga belum memanfaatkan dengan optimal setiap penerimaan pendapatan dari Pemerintah Pusat untuk belanja modal yang menjadi salah satu penyebab realisasi belanja modal pada Pemerintah Daerah di NTB belum memenuhi target realisasi nasional.

Ukuran (*size*) Pemerintah Daerah yang diukur dengan total aktiva tahun $t-1$ dari realisasi belanja modal tidak mempengaruhi belanja modal, sehingga ukuran (*size*) Pemerintah Daerah bukan merupakan faktor penentu belanja modal Pemerintah Daerah di NTB. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah di NTB belum mempertimbangkan jumlah Aktiva di dalam neraca tahun sebelumnya ($t-1$) untuk alokasi belanja modal di tahun berikutnya (t).

Belanja modal yang direalisasikan Pemerintah Daerah di NTB berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga belanja modal memiliki konsekuensi terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar belanja modal yang direalisasikan Pemerintah Daerah di NTB maka Kinerja Keuangan Daerah dari segi kemandirian daerah dapat meningkat.

5.2. Implikasi

Dari aspek teoritis penelitian ini dapat memberikan implikasi bagi pengembangan penelitian di sektor publik terutama yang berkaitan dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana setiap komponen di dalam APBD dapat dijadikan sebagai objek penelitian sehingga masyarakat dapat mengetahui kinerja suatu Pemerintah Daerah. Dari sisi teori keagenan bahwa di dalam sektor publik, terutama yang berkaitan dengan anggaran dan realisasinya syarat dengan kepentingan agen dan prinsipalnya sehingga tidak semua realisasi pendapatan daerah dialokasikan untuk belanja daerah yang dapat menyentuh langsung pelayanan kepada masyarakat seperti untuk belanja modal.

Dari aspek praktis, penelitian ini menghasilkan bahwa PAD merupakan faktor penentu belanja modal dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Bagi eksekutif dan legislatif sebagai pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk menentukan anggaran dan belanja daerah, dapat menggunakan penelitian ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan pendapatan daerah terutama pengelolaan PAD untuk belanja modal yang dapat menyentuh langsung kepada pelayanan publik. Eksekutif yang memiliki tim anggaran yang disebut TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dapat menggunakan penelitian ini sebagai pertimbangan dalam menentukan pendapatan daerah yang dapat direalisasikan untuk belanja modal. Artinya bahwa, pemerintah daerah harus dapat membuat anggaran dan merealisasikan pendapatan daerah yang dimiliki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui proporsi belanja modal yang terus meningkat setiap tahunnya. Bagi publik atau masyarakat, penelitian ini dapat memberikan gambaran pengelolaan pendapatan daerah untuk belanja modal dan konsekuensi dari belanja modal tersebut terhadap kinerja keuangan daerah. kedepan diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mengontrol eksekutif dan legislatif dalam penyusunan dan realisasi anggaran.

Dari aspek kebijakan, dengan melihat adanya pengaruh PAD terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah di NTB dan adanya pengaruh realisasi belanja modal tersebut terhadap kinerja keuangan daerah, maka sudah saatnya Pemerintah Daerah di NTB mempertegas regulasi mengenai batasan kapitalisasi dari belanja modal dan membuat regulasi mengenai belanja modal yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah di NTB setiap tahunnya, serta regulasi mengenai potensi-potensi dan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang harus terus digali dan ditingkatkan setiap tahunnya.

5.3. Keterbatasan dan Saran Penelitian Mendatang

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dapat memberikan arah bagi penelitian yang akan datang. Pertama, Penelitian ini belum memasukkan variabel non keuangan yang diprediksi berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel non keuangan seperti jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai variabel yang diduga dapat mempengaruhi belanja modal suatu Pemerintah Daerah. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan data 5 tahun dengan subjek hanya 11 Pemerintah Daerah di NTB. Penelitian selanjutnya dapat menambah subjek/lokasi penelitian dan data penelitian tidak hanya 5 tahun anggaran saja, agar hasil penelitian semakin baik.

Ketiga, kinerja keuangan daerah awalnya menggunakan 3 rasio yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio efektifitas sebagai indikator namun yang lolos untuk diuji pada tahap berikutnya hanya satu rasio yaitu rasio kemandirian. Sehingga penelitian kedepannya dapat menambahkan indikator kinerja keuangan daerah, seperti rasio keserasian dan rasio kontribusi BUMD. Keempat, untuk penelitian berikutnya, sebaiknya melakukan uji hubungan langsung antara PAD, dana perimbangan, ukuran (*size*) Pemerintah Daerah dan kinerja keuangan daerah. Sehingga dapat lebih melihat peranan belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Referensi :

- Abdullah, S., dan A. Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2 (2) : 17-32.
- Adam, N.F., B.M.Umar, dan Sosilo. 2013. Effect of Local Revenue Elasticity and General Allocation Fund on Local Expenditure Allocation (Studies in District/City of Sulawesi Tenggara 2013). *International Journal of Business and Management Invention*, 2(12) : 36-49.
- Agustina, O. 2013. Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Malang (Tahun 2007-2011). *Jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/394/339pdf*. Diakses tanggal 1 Maret 2015.
- Brodjonegoro, B. 2001. *Indonesian Intergovernmental Transfer In Decentralization Era : The Case Of General Allocation Fund. An International Symposium on Intergovernmental Transfers in Asian Countries : Issues and Practices Asian Tax and Public Policy Program, Hitotsubashi University, Tokyo*. www.econ.hit-u.ac.jp/~kokyo/.../Indonesia.PDF. Diakses tanggal 10 Februari 2015.
- Darmayasa, I.N., dan I. K. Suandi. 2014. Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi Mataram 24-27 September 2014*. <http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2014/09/157.pdf>. Diakses tanggal 23 Januari 2015.
- Darsono, I.L. 2013. Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 1(8) : 11-21.
- Darwis, E.T.R. 2015. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1605/1228>. Diakses tanggal 15 April 2015.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Harianto, D., dan P.H. Adi. 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium nasional Akuntansi X Makasar*
- Imawan, R., dan A.Wahyudin. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*. 3 (2) : 147-155.
- Kurniawan, A. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung*. Tesis. Universitas Lampung.
- Manik, T., dan L. Suprihartini. 2013. Analisis Pengaruh Pelaksanaan Manajemen Publik melalui Pengukuran Value For Money dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Penggunaan Belanja Modal : Studi Empiris di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012. *JEMI* 4 (2): 15-30.
- Mayasari, L.P.R., N. K. Sinarwati., dan G. A. Yuniarta. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha*, 2 (1).
- Nugroho, F. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1 (2): 1-14.
- Oktora, F.E., dan W. Pontoh. 2013. Analisa Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Accountanility*, 2 (2) : 1-10
- Paujiah, S.P. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya). journal.unsil.ac.id/download.php?id=367. Diakses tanggal 25 Desember 2014.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Sholikhah, I., dan A.Wahyudin. 2014. Analisa Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal* 3(4): 553-562
- Simanullang, G. 2013. Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008-2012. *Umrah Journal of Accounting* 1(1) : 1-24.

- Subowo dan E.R. Wati. 2010. Hubungan antara PAD dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Pemda Kudus. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2 (2) : 73-82.
- Sugiono, S. 2014. Pengaruh Moderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Hubungan Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2 (3): 1-27.
- Suhardjanto. 2010. Influence of Parliament Characteristic Toward Mandatory Accounting Disclosure Complaine in Indonesia. *Hibah Penelitian Publikasi International LP2M UNS*.
- Tuasikal, A. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Universitas Pattimura Ambon. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 1 (2) : 142-155
- Wandira, A.G. 2013. Pengaruh PAD,DAU,DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2 (1): 44-51.
- www.djpk.kemenkeu.go.id
- www.ntbprov.go.id

Lampiran :

1). Populasi Penelitian

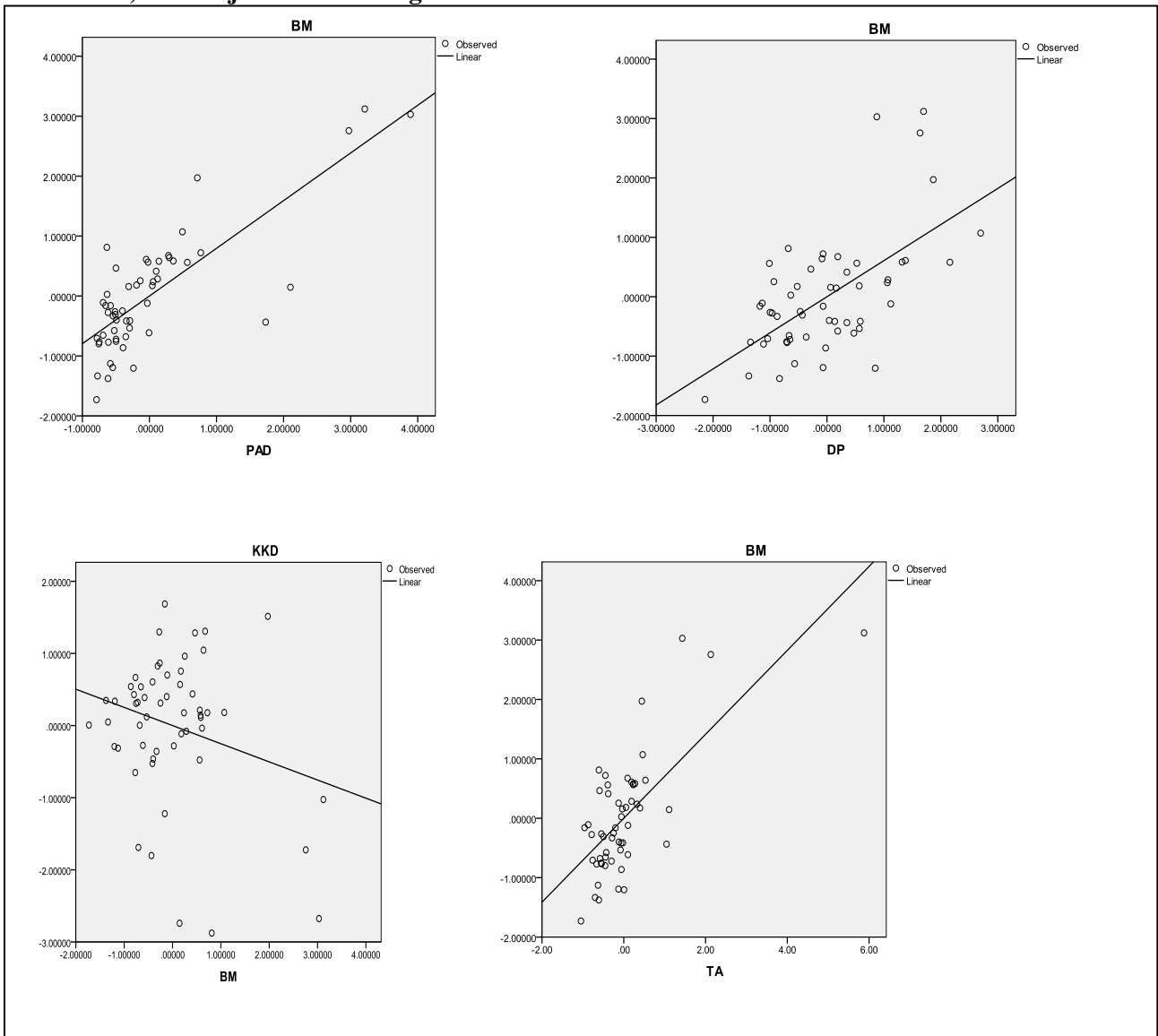
No	Nama Daerah	No	Nama Daerah
1.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	7.	Kabupaten Sumbawa Barat
2.	Kota Mataram	8.	Kabupaten Sumbawa
3.	Kabupaten Lombok Barat	9.	Kabupaten Dompu
4.	Kabupaten Lombok Utara	10.	Kabupaten Bima
5.	Kabupaten Lombok Tengah	11.	Kota Bima
6.	Kabupaten Lombok Timur		

Sumber : www.ntbprov.go.id (diolah)

2). Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KKDrk	55	.02	.44	.0975	.10050
KKDre	55	.84	1.11	.9882	.04106
KKDrf	55	.35	2.24	1.0487	.34623
BMt	55	.00	33812546418.00	7467294739.3945	8372215207.14510
BMpm	55	4720064390.00	48352535672.00	24772253363.9455	10479293744.17964
BMgb	55	6050229500.00	122001788340.11	44542376119.1178	25402987166.60165
Bmjij	55	717637300.00	309337231280.00	66977094737.5976	64789783233.91760
BMatl	55	179425000.00	28518901133.00	3463910444.5818	5572048729.34589
PADpd	55	1665256767.00	697834322423.00	59468668843.1193	148995291053.75998
PADrd	55	924036412.00	59556930781.72	15461136324.6451	13623276818.26734
PADhpkd	55	.00	135639075065.00	13320326905.8385	24129735442.72581
PADps	55	1970237210.00	101413267480.64	17319323797.1504	22137138678.43942
DPdau	55	162614416000.00	932462555000.00	465128066400.0002	193234583246.89230
DPdak	55	3300000000.00	106989740000.00	51847092090.9091	20500953464.14942
DPdbh	55	17641692982.00	191526128114.00	60037180459.0729	41127901064.45069
Sta	55	.00	5178190837523.88	1445518815170.1208	984159976167.43520
Valid N (listwise)	55				

3) Hasil Uji Linieritas dengan *Curve Estimation*



4). Cross Loading

	BM	DP	KKD	PAD	S
BMgb	0,6872	0,6371	0,4463	0,6367	0,4712
BMpm	0,5878	0,4351	0,3971	0,5265	0,4337
BMt	-0,0612	0,134	-0,0931	-0,0174	0,0147
Bmatl	-0,023	0,1113	-0,0206	-0,0221	0,0442
Bmjij	0,9593	0,7012	0,645	0,8601	0,7184
DPdbh	0,6674	0,8917	0,7683	0,7602	0,7191
Dpdak	0,2736	0,3656	-0,1148	0,1556	0,3155
Dpdau	0,5572	0,7445	0,3383	0,558	0,7556
KKDrk	0,671	0,7041	1	0,8056	0,7493
PADhpkd	0,601	0,573	0,7451	0,6683	0,527
PADpd	0,7587	0,7278	0,8973	0,8436	0,8291
PADps	0,8385	0,7425	0,6289	0,9323	0,7064
PADrd	0,3276	0,5962	0,5578	0,3643	0,6416
Sta	0,7383	0,8734	0,7493	0,779	1

Sumber : Output PLS (2015)

5). Overview Output SmartPLS

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
BM	0	0	0,8125	0	0,3485	-0,008
DP	0	0	0	0	0,4944	0
KKD	1	1	0,4502	1	1	0,4502
PAD	0	0	0	0	0,54	0
S	0	0	0	0	1	0

Sumber : Olah PLS (2015)

6). Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
BMgb -> BM	0,1562	0,1715	0,2017	0,2017	0,7744
BMpm -> BM	0,2562	0,2388	0,1191	0,1191	2,151
BMt -> BM	-0,0093	0,0059	0,0896	0,0896	0,1043
Bmatl -> BM	-0,0256	-0,0161	0,0975	0,0975	0,2626
Bmjij -> BM	0,7723	0,7451	0,1663	0,1663	4,643
DPdbh -> DP	0,7406	0,7332	0,1224	0,1224	6,0516
Dpdak -> DP	0,0684	0,0538	0,3274	0,3274	0,209
Dpdau -> DP	0,4225	0,4078	0,2651	0,2651	1,5938
PADhpkd -> PAD	0,3335	0,3192	0,184	0,184	1,8124
PADpd -> PAD	0,1234	0,1526	0,2774	0,2774	0,4446
PADps -> PAD	0,7315	0,6647	0,2256	0,2256	3,2422
PADrd -> PAD	-0,0246	-0,023	0,1542	0,1542	0,1593
Sta -> S	1	1	0	0	0
KKDrk <- KKD	1	1	0	0	0

Sumber : output *bootstrapping* PLS (2015)

7). Gambar Hasil Bootstrapping smartPLS

